

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Rosita Wulandari

Universitas Pamulang, Banten
rosita_1882@yahoo.co.id

Submitted: 18th Feb 2021/ **Edited:** 30th Mar 2021/ **Issued:** 01st Apr 2021

Cited on: Wulandari, R. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), 411-420.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of partially balanced funds, local tax revenues and regional expenditure on the financial performance of local governments in the Indonesian province. This study was conducted at the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) Ministry of Finance in the period 2012-2018 through the official website www.djpk.kemenkeu.go.id. Regional financial performance is measured using the ratio of fiscal decentralization by comparing the Original Regional Revenue and Total Revenue, while the balancing fund, Regional Tax Revenue and Regional expenditure are calculated based on each of the realization of these variables. The population used in this study is all provinces in Indonesia during the 2012-2018 period as many as 34 provinces. Sampling uses the Purposive Sampling method with the criteria of the provincial government which has an official website of the local government and which publishes the Budget Realization Report (LRA) so that a sample of 14 provinces is obtained over a 7-year period. The results showed that simultaneous balancing funds, local tax revenues, and regional spending affect the financial performance of provincial government in Indonesia. Whereas partially shows that regional tax revenue and regional expenditure affect the financial performance of the provincial government in Indonesia while the balance fund does not affect the financial performance of the provincial government in Indonesia. Future studies can develop the results of this study by adding other variables such as regional retribution, size and wealth, and can replace financial performance measurements with efficiency ratios or regional independence ratios.

Keywords: Balance Funds, Tax Revenue, Expenditures, Financial Performance

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan melimpahkan kewenangan kepada setiap daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten untuk menciptakan dan mengatur perekonomiannya sendiri,

seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pemerintah melimpahkan kewenangan tersebut, dengan harapan setiap daerah mampu dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana yang berguna untuk kegiatan ekonomi daerahnya masing-masing.

Pelimpahan kewenangan kepada setiap daerah dari pemerintah pusat yang disebut otonomi daerah, memiliki konteks kinerja dengan dua sisi yang berbeda. Di mana sisi pertama, pemerintah mempunyai kewenangan yang begitu besar atas daerahnya. Sedangkan sisi kedua kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan, mendapatkan tugas berat yang mengikuti aturan otonomi daerah tersebut yaitu tingginya transparansi dan akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat dari seluruh kinerja pemerintah daerah.

Otonomi daerah diartikan “sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom, untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut aspirasi masyarakat, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Otonomi daerah merupakan aspek penting dalam sistem pembiayaan, karena pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh langsung terhadap sistem pembiayaan, pengawasan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah ini menuntut kepada daerah otonom untuk melaksanakan kegiatan pemerintah secara mandiri yang disebut sebagai otonomi daerah. Di mana pada kenyataannya tidak semua daerah bisa mandiri dan terpisah dengan pemerintah pusat. Masih terdapat daerah yang pendapatan daerahnya lebih kecil daripada bantuan dari pusat.

Kinerja keuangan daerah merupakan aspek penting yang dinilai oleh masyarakat mengenai akuntabilitas organisasi dan manajemen untuk menghasilkan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik lagi. Hal ini disebabkan karena kebijakan pelaksanaan pemerintah daerah yang sudah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri masih berada dalam pengelolaan pemerintah pusat. Hubungan yang dimiliki antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat salah satunya adanya hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal ini terlihat dari pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. Akuntabilitas bukan merupakan kemampuan menunjukkan bagaimana uang masyarakat dibelanjakan, melainkan harus dibelanjakan secara ekonomi, efektif dan efisien (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Masih bergantungnya sebagian besar provinsi di Indonesia terlihat jelas dari lebih besarnya jumlah dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat, untuk membiayai kebutuhan daerah dari pajak daerah yang merupakan pendapatan yang berasal dari pajak di daerah tersebut yang kemudian digunakan untuk dapat membiayai daerahnya sendiri dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Wahyudin, 2020).

Menurut data Laporan Realisasi Anggaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menunjukkan realisasi dana perimbangan dari tahun 2012-2018 pada sebagian besar provinsi masih lebih besar dari realisasi pendapatan pajak dengan periode yang sama, hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari provinsi yang ada di Indonesia berhasil melakukan desentralisasi. Belanja daerah pada periode 2012-2018 sebagian daerah juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun melampaui pendapatan yang berasal dari dana perimbangan maupun pajak daerah. Dari 34 provinsi di Indonesia, pada tahun 2012-2018 yang secara periodik hanya ada 6 provinsi yang pendapatan pajaknya diatas dana perimbangan, yaitu Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 11 provinsi yang Belanja Daerahnya melebihi total dana perimbangan dan Pendapatan Pajak daerahnya Adapun provinsinya terdiri Aceh, Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Tengah.

Rendahnya penilaian kinerja pemerintahan di mata masyarakat menjadi permasalahan akibat akibat Tingginya belanja daerah. Hal tersebut dikarenakan besarnya proporsi belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung baik berupa dana investasi maupun dana pelayanan masyarakat yang terkait langsung dengan tujuan organisasi. Sedangkan filosofi pengelolaan keuangan dalam

pemerintahan adalah bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas keuangan harus jelas, yaitu kemakmuran masyarakat.

LANDASAN TEORI

Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Beberapa ahli menjelaskan, keberhasilan organisasi tidak terlepas dari tata kelola manajemen yang baik, dan good governance terwujud karena seluruh sumber daya manusia yang ada di dalamnya merasa memiliki, istilah ini sering dikenal dengan kata “stewardship”. Hubungan teori stewardship pada dana perimbangan yaitu dengan pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan seimbang. Demikian pula termasuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat (Verawaty, et, al., 2020).

Jumlah dana perimbangan yang tinggi yang diterima oleh pemerintah daerah akan dapat menjadi sumber pembiayaan yang cukup bagi pemerintah daerah sehingga mampu menjamin kelancaran kegiatan operasional pemerintah daerah dan mampu menciptakan kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya, jika dana perimbangan yang diterima kecil maka pemerintah daerah mempunyai kemungkinan untuk mengalami kekurangan dana untuk kegiatan operasionalnya sehingga kinerja yang dihasilkan kurang optimal. Dalam penelitian Priyono, et, al. (2020) variabel dana perimbangan menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Sari, et, al. (2020) yang menyimpulkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Jumlah pendapatan pajak daerah yang tinggi dapat mencerminkan jika daerah tersebut sudah mampu mandiri dan menggali dan mengelola sumber pendapatan pajaknya dengan baik. Semakin tinggi pendapatan pajak daerah maka semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut karena dengan begitu maka daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan operasional sendiri tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Prastiwi & Aji, 2020). Sebaliknya, jika pendapatan pajak daerah

kecil maka dapat mencerminkan jika daerah tersebut belum mampu mengelola keuangan dan mencukupi kebutuhannya sendiri dengan kata lain kinerja keuangan daerah tersebut dapat dikatakan belum baik. Dalam penelitian Matande (2020) variabel pendapatan pajak daerah menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Siregar (2020) yang menyimpulkan bahwa pendapatan pajak daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Belanja daerah yang semakin tinggi seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Dalam penelitian Angelina, et, al. (2020) variabel belanja daerah menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Dasmar, et, al. (2020) dan Fatimah & Hasbullah (2020) yang menyimpulkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana Perimbangan, Pendapatan Pajak Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Jumlah dana perimbangan yang tinggi dapat membiayai dan menjamin kebutuhan operasional pemerintah daerah, sama halnya dengan pendapatan pajak yang baik maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri ketika dapat menggali potensi pajaknya dengan maksimal untuk membiayai kebutuhan daerahnya, begitu pula dengan belanja daerah yang tinggi harusnya menggambarkan semakin tinggi pula pelayanan di daerah tersebut.

Dalam penelitian Priyono, et, al. (2020) variabel dana perimbangan dan pendapatan pajak daerah menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian dalam penelitian Angelina, et, al. (2020) variabel belanja daerah menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Dasmar, et, al. (2020) yang menyimpulkan bahwa dana perimbangan dan belanja daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga hasil penelitian dari Matande (2020) yang menyimpulkan bahwa pendapatan pajak daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Langkah-langkah ilmiah yang diambil dalam penelitian ini merupakan bagian dari pembuktian secara logis dan terukur, sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan. Adapun sistematika ilmiah yang digunakan adalah:

1. Penelitian ini dibangun di atas paradigma kuantitatif. Hal ini dimaksudkan agar temuan-temuan penelitian dapat dipahami dengan mudah.
2. Orientasi analisis merujuk pada analisis statistik regresi linear. Hal ini dimaksudkan agar dapat dikemukakan kemungkinan atau estimasi yang berimplikasi pada upaya peningkatan dan atau pencegahan.
3. Secara eksplisit data penelitian diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode tahun 2012 – 2018 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
4. Objek penelitian berjumlah 34 provinsi di Indonesia dengan teknik pengumpulan data (sampling) secara purposif. Yakni ditetapkan sejumlah kriteria, guna memudahkan proses penelitian.
5. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka diperoleh 98 data selama periode 2012-2018 dari 14 provinsi.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Perimbangan	98	894544324851	18969291389929	3878877635745,62	3984108063916,456
Pendapatan Pajak Daerah	98	326313065000	37538912327312	5680394433501,02	8012987298152,186
Belanja Daerah	98	1739517404467,0 000	61410121851157,0 000	11279097487150,10 4000	12086442251014,1660 000
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	98	,0005	,7620	,430715	,1956928
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Data penelitian, 2020

Merujuk pada tabel di atas, maka dapat diketahui informasi terkait jumlah data yang terkumpul, yakni sebanyak 98 data. Secara eksplisit jumlah data ini sejalan dengan kaidah ilmiah yang telah dikemukakan pada metode penelitian. Sehingga, dengan

terkumpulnya data ini maka dapat dimungkinkan dilakukan analisis dan menghasilkan temuan-temuan yang menjelaskan fenomena riset yang tengah di teliti.

Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 894.544.324.851 yang diperoleh provinsi DI Yogyakarta pada periode 2012. Sedangkan nilai maksimum 18.969.291.389.929 yang diperoleh provinsi DKI Jakarta pada periode 2017. Nilai rata-rata variabel Dana Perimbangan sebesar 3.878.877.635.745,62 dan standar deviasi sebesar 3.984.108.063.916,456. Data ini memberikan gambaran, secara umum pemerintah daerah tingkat provinsi mendapat dana transfer dari pemerintah pusat (dari APBN) cukup besar dengan rata-rata tiga triliun, sehingga pemerintah daerah provinsi memiliki keleluasaan di dalam melakukan percepatan pembangunan daerah, dengan demikian berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Variabel Pendapatan Pajak Daerah memiliki nilai minimum sebesar 326.313.065.000 yang diperoleh provinsi Papua pada periode 2013. Sedangkan nilai maksimum 37.538.912.327.312 yang diperoleh provinsi DKI Jakarta pada periode 2018. Nilai rata-rata variabel Pendapatan Pajak Daerah sebesar 5.680.394.433.501,02 dan standar deviasi sebesar 8.012.987.298.152,186. Data ini cukup menarik, pasalnya rata-rata penerimaan pajak daerah jauh lebih besar dari dana transfer pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah tingkat provinsi memiliki potensi yang besar, maka diperlukan tata kelola keuangan yang baik, sehingga penggunaannya tepat sasaran.

Variabel Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar 1.739.517.404.467,0000 yang diperoleh provinsi DI Yogyakarta pada periode 2012. Sedangkan nilai maksimum 61.410.121.851.157,0000 yang diperoleh provinsi DKI Jakarta pada periode 2018. Nilai rata-rata variabel Belanja Daerah sebesar 11.279.097.487.150,104000 dan standar deviasi sebesar 12.086.442.251.014,166. Data ini mengonfirmasi, bahwa anggaran belanja jauh lebih besar dari dana perimbangan dan pendapatan daerah. Fakta ini memberikan pemahaman, penting bagi pemerintah daerah dan dibantu oleh DPRD untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran, sehingga tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah atau menjadi penghambat terhadap pembangunan daerah.

Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,0005 yang diperoleh provinsi Bali pada periode 2013. Sedangkan nilai maksimum 0,7620 yang diperoleh provinsi DKI Jakarta pada periode 2015. Nilai rata-rata variabel

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,430715 dan standar deviasi sebesar 0,1956928.

Analisis Persyaratan Regresi

Hasil olah data mengemukakan luaran angka statistik yang menjelaskan:

1. Data penelitian berdistribusi normal. Artinya 98 data yang diperoleh dari 14 provinsi, merupakan data yang representatif dari 34 provinsi di Indonesia. Sehingga, dimungkinkan data penelitian memiliki sifat linear.
2. Data penelitian terbebas dari asumsi multikolinearitas. Artinya, 98 data merupakan data yang identik dari berbagai data yang antara satu dengan yang lain tidak saling berkaitan, sehingga di dalam pengujian regresi tidak terganggu oleh adanya kesamaan antar variabel prediktor.
3. Data penelitian terhindar dari masalah autokorelasi. Artinya, 98 data penelitian adalah data yang diperoleh dari variabel bebas dan terikat, dan sangat memungkinkan untuk memunculkan estimasi.

Pengujian Hipotesis

Tabel 2. Uji Hipotesis Berbasis Regresi Linear

Hipotesis	Nilai Estimasi	Keterangan
Konstan	0,420	Signifikan
Dana perimbangan > Kinerja Keuangan	0,146	Tidak signifikan
Pendapatan pajak > Kinerja Keuangan	1,987	Signifikan
Belanja daerah > Kinerja Keuangan	-1,292	Signifikan

Sumber: Data penelitian, 2020

Konstan

Nilai konstan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia sebesar 0,420 dengan keputusan signifikan. Artinya, secara alamiah pemerintah daerah telah berupaya menghadirkan tata kelola keuangan yang baik. Hal ini terkonfirmasi oleh data deskriptif, di mana pemerintah provinsi mampu memaksimalkan potensi daerah, sehingga mendapatkan penghasilan yang cukup besar, yakni rata-rata lima triliun (pendapatan pajak).

Pengaruh Dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Temuan ini sangat menarik, secara statistik dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat selama periode 2012-2018 menunjukkan kontribusi yang rendah,

yakni sebesar 0,146 dengan keputusan tidak signifikan. Artinya, tata kelola pemerintahan daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga dapat menunjukkan kemandiriannya.

Pengaruh Pendapatan pajak terhadap Kinerja Keuangan

Nilai estimasi pengaruh pendapatan pajak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sangat besar, yakni 1,987 dengan keputusan signifikan. Temuan ini mengonfirmasi keadaan sesungguhnya, di mana pajak merupakan sumber pendapatan utama dan terbesar bagi pemerintah daerah dan pusat.

Pengaruh Belanja daerah terhadap Kinerja Keuangan

Nilai estimasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi adalah negatif, yakni sebesar -1,292 dengan keputusan signifikan. Hasil ini sangat realistis dan logis, serta sejalan dengan faktanya. Bahwa benar, belanja daerah itu menjadi pengurang bagi kinerja keuangan. Semakin besar beban belanja, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah di dalam melakukan efisiensi anggaran, akibatnya pemerintah daerah akan mengalami defisit anggaran. Dampak dari hal tersebut, secara nyata adalah terhambatnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Hal yang dapat dicermati dari temuan penelitian ini adalah, bahwa variabel kinerja keuangan adalah parameter atas terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance). Tentu, secara luas dapat dipahami, bahwa kinerja keuangan merupakan representatif dari kerja keras semua pihak yang profesional dan berintegritas. Sebagaimana hasil statistik regresi menunjukkan, pada dasarnya kinerja pemerintah provinsi sangat baik, terlebih adanya faktor yang mempengaruhinya seperti dana perimbangan, pendapatan pajak, dan belanja daerah. Secara akumulatif menunjukkan adanya keterkaitan secara linear, sehingga penting untuk memperhatikan ketiga faktor tersebut, khususnya faktor pendapatan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan

Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2018. *Bahtera Inovasi*, 4(1), 36-53.

- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). PENGARUH KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584-598.
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). *JURNAL AL-IQTISHAD*, 16(2), 39-57.
- Fatimah, S., & Hasbullah, Y. (2020). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019. *Journal of Economics and Business*, 6(2), 1-27.
- Matande, I. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN TORAJA UTARA. *Economics Bosowa*, 5(001), 124-132.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANA KEISTIMEWAAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89-105.
- Priyono, N., Fatimah, A. N., & Nurcahya, Y. A. (2020). PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 212-225.
- Sari, N., Nainggolan, B. R. M., Purba, R. A., Saragih, T. B., & Banjarnahor, W. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1), 219-223.
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 26-42.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Journal Management, Business, and Accounting*, 19(1), 21-37.
- Wahyudin, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86-97.